

LKJ-IP

2022

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN



Pemerintah Kota
Dumai
2023



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, syukur kepada Allah Ta'ala, Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, Pembuat gelap dan terang, Yang menganugerahi akal kepada manusia untuk memahami kitab-Nya. Atas berkat hidayah-Nya maka kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022.

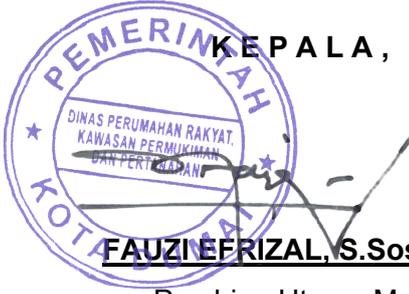
Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan tersebut di masa yang akan datang.

Semoga LKj-IP yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022 dan dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Dumai, Januari 2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI

KEPALA,



FAUZI FRIZAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720702 199201 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
B. SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI.....	4
C. DASAR HUKUM	6
D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGI ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan RPJMD Kota Dumai	8
2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	10
B. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022	15
C. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	20
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022.....	22
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022	28
B. REALISASI ANGGARAN.....	31
BAB IV PENUTUP.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai didukung oleh tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan dari berbagai macam disiplin ilmu. Khususnya dalam mendukung terwujudnya pencapaian kinerja dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai yang telah disusun. Selain dukungan SDM, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai juga dilengkapi dengan standar minimal sarana dan prasarana yang turut menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut.

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Dumai tanggal 27 Mei 2022, terdiri dari:

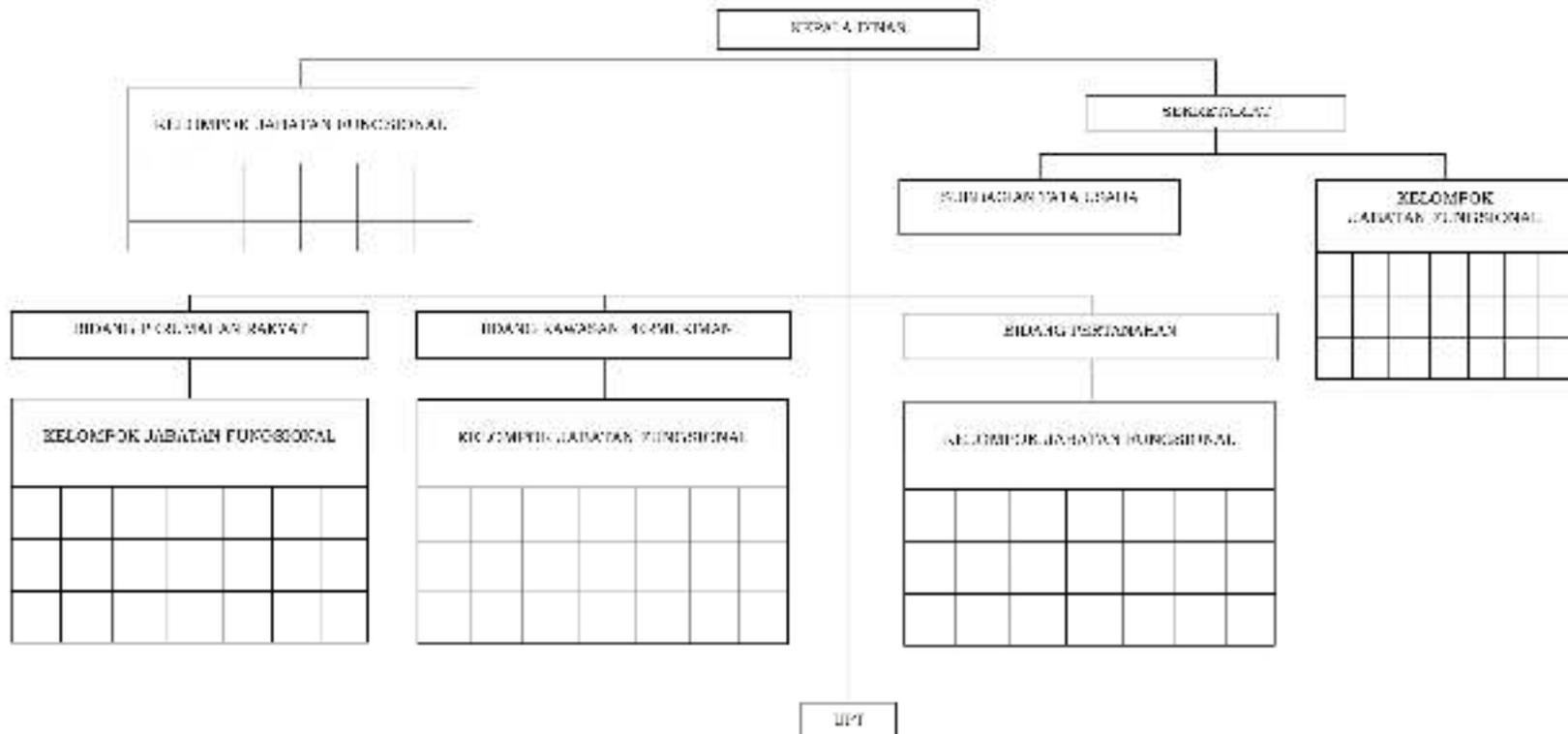
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPT



Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai, sebagai berikut.

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
 KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI





Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai serta Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Dumai.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai mempunyai tugas:

“Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.”

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai mempunyai fungsi:

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
5. Pelaksana administrasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.



B. SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia dengan personil kepegawaian sebanyak 61 orang, yang terdiri atas:

Golongan IV / Eselon II	= 1 orang
Golongan IV / Eselon III	= 1 orang
Golongan III / Eselon III	= 3 orang
Golongan III / Eselon IV	= 1 orang
Golongan IV / Fungsional	= 1 orang
Golongan III / Fungsional	= 8 orang
Golongan III / Pelaksana	= 10 orang
Golongan II / Pelaksana	= 4 orang
Honorer (Non PNS)	= 32 orang

Berdasarkan Golongan Ruang, pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Golongan (Ruang)				Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		IV	III	II	I	L	P	
1.	Sekretariat	2	7	1	-	6	4	10
2.	Perumahan Rakyat	-	5	2	-	5	2	7
3.	Kawasan Permukiman	1	6	1	-	7	1	8
4.	Pertanahan	-	4	-	-	3	1	4
5.	UPT	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2** Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Pendidikan						Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		SD	SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	L	P	
1.	Sekretariat	-	-	1	-	7	2	6	4	10
2.	Perumahan Rakyat	-	-	1	1	4	1	5	2	7
3.	Kawasan Pemukiman	-	-	1	-	6	1	7	1	8
4.	Pertanahan	-	-	-	-	3	1	3	1	4

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu

No.	Disiplin Ilmu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Sarjana Teknik	8	5	13
2.	Sarjana Sosial	6	-	6
3.	Sarjana Ekonomi	2	-	2
4.	Sarjana Ilmu Pemerintahan	1	1	2
5.	Sarjana Arsitektur	-	1	1
6.	Sarjana Pendidikan	1	-	1
7.	Diploma III Ekonomi	1	-	1

Inventarisasi aset sarana dan prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai

No.	Nama Barang	Jumlah (unit/buah)
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	5 buah
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	3 buah
3.	Mesin Fotokopi	1 unit
4.	Komputer	7 unit
5.	Laptop	10 unit
6.	Printer	8 unit



C. DASAR HUKUM

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 33 Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026
8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 7 Seri D)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11. Strategi Sanitasi Kota Dumai
12. SK Walikota Dumai Nomor 922 Tahu 2021 tentang Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman



14. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa
15. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kota Dumai 2018
16. Peraturan Menteri Penataan Ruang RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
18. Peraturan Daerah No. 7/2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Pertanahan

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGI ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Permasalahan yang timbul berdasarkan tugas & fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai berdasarkan RPJMD dan Renstra sebagai berikut:



1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan RPJMD Kota Dumai

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni sebanyak 17,69% dari jumlah RT
- b. Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin atau baru mencapai lebih kurang 26%
- c. Terbatasnya penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman
- d. Menurun dan terbatasnya kapasitas pembangunan sarana PSU

2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai

Identifikasi masalah perlu dilakukan untuk menjabarkan dan mencari simpul dari permasalahan yang telah menghambat/menghalangi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Dumai. Penjabaran permasalahan pokok dalam pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	1.1 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	1.1.1 Terbatasnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
2	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	2.1 Luasnya pemukiman yang memerlukan infrastruktur dasar yang layak Jangkauan 2.2 penyediaan infrastruktur dasar	2.1.1 Besarnya jumlah pemukiman yang belum mendapat layanan infrastruktur dasar Masih belum meratanya cakupan komponen prasarana, sarana dan



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		yang belum menyeluruh	utilitas umum yang dibangun
3	Masih terdapatnya luasan kawasan kumuh di Kota Dumai	3.1 Kawasan kumuh	3.1.1 Luasnya pemukiman kumuh 3.1.2 Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang belum terencana dan teratur



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2022 mengacu pada misi 3 pada RPJMD Kota Dumai yang berbunyi:

“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas”

Pencapaian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai juga didukung dengan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah Kota Dumai yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
1. Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.1. Meningkatnya infrastruktur Kota	1.1.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1.1.3.1 Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman
			1.1.3.2 Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
	1.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	1.2.1 Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	1.2.1.1 Memanfaatkan ruang secara bijaksana/ menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2022 maka dirumuskan Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Dumai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	50%	61,35%	69,98%	78,61%	88,47%	97,14%
			Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	0%	22,70%	39,96%	57,22%	79,64%	94,28%
			Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Prasarana,	Tercapainya Prasarana, Sarana dan	Persentase peningkatan PSU	11%	35,22%	48,23%	61,51%	86,17%	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan pemukiman	Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	11%	35,2%	48,2%	61,5%	86,2%	100%
3.	Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan per tahun	0%	20%	40%	60%	80%	100%
			Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	0%	20%	40%	60%	80%	100%

Indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.3** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai 2021–2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	50%	61,35%	69,98%	78,61%	88,47%	97,14%	97,14%
2.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	0%	22,70%	39,96%	57,22%	79,64%	94,28%	94,28%
3.	Persentase Rumah yang Aman Pasca Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Peningkatan PSU	11%	35,22%	48,23%	61,51%	86,17%	100%	100%
5.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	11%	35,2%	48,2%	61,5%	86,2%	100%	100%
6.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
7.	Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%



Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai 2021–2026, Rencana Kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Kota Dumai merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2022. Dalam rangka terwujudnya komitmen penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah.

Tabel 2.4 Indikator kinerja dan target Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai tahun 2022 yang direncanakan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	22,7
		2 Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100
2	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	1 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	35
3	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	1 Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	20



B. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022

Perjanjian kinerja (PK) merupakan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh OPD terkait dengan Kepala Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun materi yang disepakati berkaitan dengan sasaran strategis, indikator kinerja *outcome*, target, program dan anggaran pada tahun terkait.

1. Sasaran : Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
 - IKU : Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh
 - Target Tahun 2022 : 22,7%
 - Program : Program Kawasan Permukiman Rp 17.895.615.300,-
 - Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Rp 250.000.000
 - Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Rp 250.000.000
 - Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Rp 111.850.200
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Rp 100.065.100
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Rp 11.785.100
 - Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Rp 17.533.765.100
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Rp 100.000.000
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Rp 216.798.000



Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Rp 4.044.798.096

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Rp 23.660.000

3. Sasaran : Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik
 IKU : Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat
 Target Tahun 2022 : 20%
 Program : Program Penatagunaan Tanah Rp 100.000.000
 Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Rp 100.000.000
 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Rp 100.000.000

C. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2022

Tujuan 1 : Meningkatkan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman dengan sasaran :

1. Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
 - Dengan target indikator kinerja sasaran *Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh* yang direncanakan sebagai berikut :
 - Triwulan 1 dan 2, nilai target yang direncanakan nol (0)
 - Triwulan 3, nilai target 11,35 %
 - Triwulan 4, nilai target 22,7 %
 - Dengan target indikator kinerja sasaran *Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota* yang direncanakan sebagai berikut :
 - Triwulan 1, 2, 3 dan 4 nilai target yang direncanakan 100% karena merupakan SPM

Tujuan 2 : Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan pemukiman dengan sasaran :

1. Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada



perumahan dan kawasan pemukiman

- Dengan target indikator kinerja sasaran *Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU* yang direncanakan sebagai berikut:

Triwulan 1 dan 2, nilai target yang direncanakan nol (0)

Triwulan 3, nilai target 17,5 %

Triwulan 4, nilai target 35 %

Tujuan 3 : Meningkatkan Pelayanan Pertanahan dengan sasaran :

1. Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik

- Dengan target indikator kinerja sasaran *Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat* yang direncanakan sebagai berikut:

Triwulan 1, 2 dan 3, nilai target yang direncanakan nol (Anggaran tersedia pada APBD Perubahan triwulan 4)

Triwulan 4, nilai target 20 %

(Perjanjian Kinerja Disperkimtan 2022 Terlampir)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, seberapa jauh efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada. Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari:

Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kinerja

Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kinerja

Nilai capaian kinerja masing-masing indikator dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka pencapaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut (Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004):

**Tabel 3.1** Skala Penilaian Kinerja

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Nilai di bawah 55	kurang
2.	Nilai ≥ 55 s/d < 70	cukup
3.	Nilai ≥ 70 s/d < 86	baik
4.	Nilai ≥ 86 s/d < 100	sangat baik
5.	Nilai ≥ 100	memuaskan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2021-2026

Pada tahun 2022, pencapaian Sasaran Strategis 1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai yakni Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja sasaran Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai 100 % berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh dengan capaian 100% dan Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang merupakan Standar Pelayanan Minimal dengan capaian 100%. Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan melihat tingkat capaian penanganan kumuh Kota Dumai di banding tahun 2021 di mana tidak ada intervensi penanganan Kumuh Kota Dumai akibat refocusing anggaran pasca Covid - 19

Pencapaian Sasaran Strategis 2 yakni Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman dengan indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan PSU tercapai 100% berdasarkan indikator kinerja utama Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan capaian 100%. Di bandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yaitu Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan dengan capaian 0% atau belum bisa terlaksana dikarenakan refocusing anggaran pasca Covid-19. Pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan sosialisasi penyerahan aset PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Dumai yang menjadi rencana aksi KPK juga sebagai tahapan teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman



dan Pertanahan Kota Dumai dalam melaksanakan intervensi terhadap PSU di perumahan untuk tahun-tahun ke depan sesuai amanat Permendagri 90 tahun 2019.

Pencapaian Sasaran Strategis 3 yakni Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik dengan indikator kinerja sasaran Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun tercapai 100% berdasarkan indikator kinerja utama Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat dengan capaian 100%. Pada tahun 2022, terdapat 5 kasus konflik pertanahan di Kota Dumai yang dilaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai. Telah dilakukan tindak lanjut dan mediasi terhadap seluruh kasus konflik pertanahan tersebut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang di emban oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai. Sasaran Strategis ini merupakan indikator baru di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai karena terjadi perubahan Tupoksi berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, oleh karena itu indikator sasaran strategis ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	KATEGORI NILAI
Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	61,35	100	>100	Memuaskan
Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase Peningkatan PSU	%	35	100	>100	Memuaskan
Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	20	20	100	Memuaskan



2. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 urusan Wajib Pelayanan Dasar (Perumahan Rakyat), maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Organisasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	KET	KATEGORI NILAI
Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	22,7	88	>100	Pada tahun 2022 pengurangan kumuh Kota Dumai yaitu seluas 24,85 Ha	Memuaskan
Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	%	100	100	100		Memuaskan
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	35,2	80	>100		Memuaskan
Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	20	20	100		Memuaskan

Berdasarkan data di atas, secara umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 ini. Dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), ada sebanyak 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya memuaskan (tercapai 100%).

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Dari 2 (dua) sasaran



strategis yang ditetapkan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai berhasil mewujudkan seluruh sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 100% (kategori nilai sangat baik). Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai tahun 2021 yakni terdapat 2 indikator dengan capaian 100%, 1 Indikator dengan capaian 85% dan 1 Indikator yang tidak tercapai (efek dari pasca covid 19), maka terlihat ada peningkatan pencapaian sasaran IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022 yakni seluruh capaian indikator 100%.

Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai sebagai berikut:

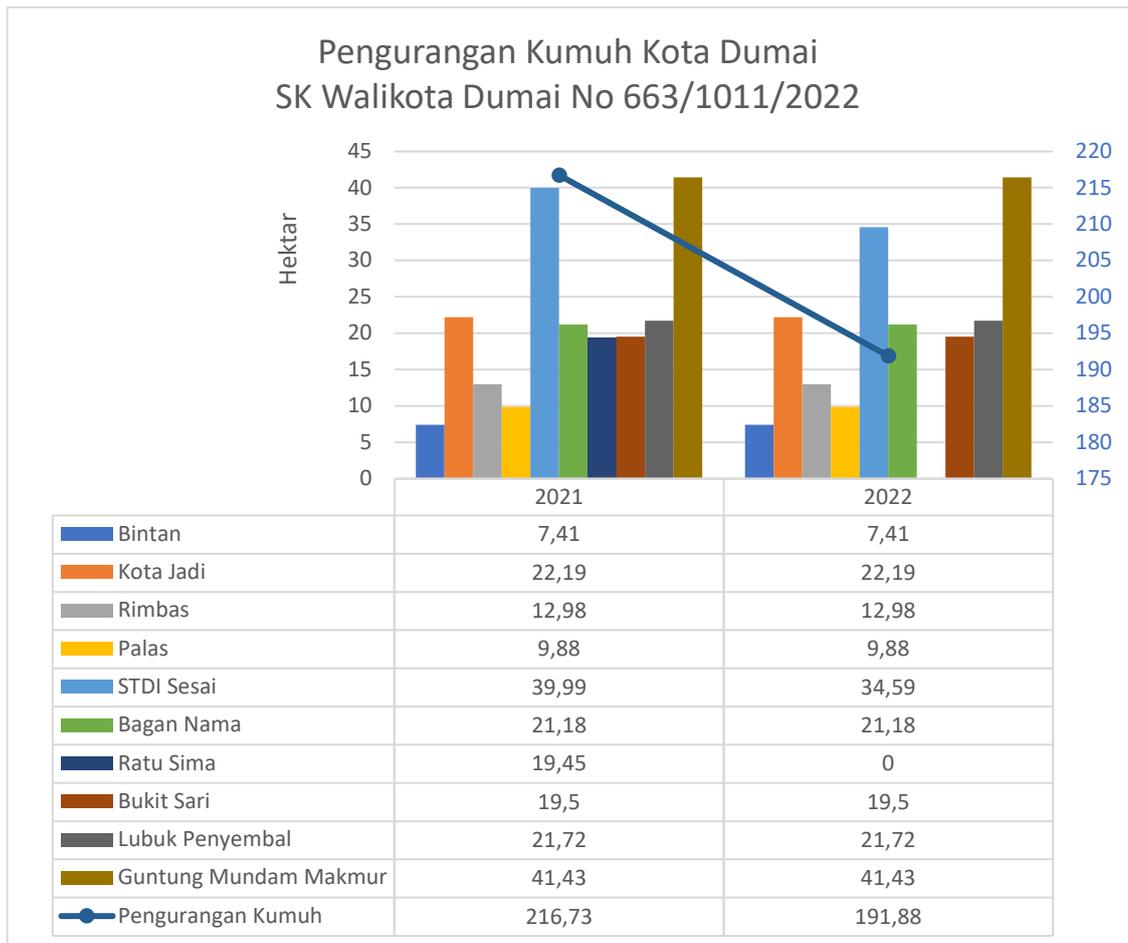
Sasaran Strategis 1: Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

I. Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh

Berdasarkan Berita acara kesepakatan perhitungan dan penetapan pengurangan luasan kumuh kota Dumai menetapkan pengurangan kumuh kota Dumai tahun 2022 sebanyak 24,85 ha dari total 41,53 ha (sebelumnya pada IKU ditetapkan 28,24 ha) dengan persentase capaian melebihi target 388 % pada 2 Kecamatan dan 2 kelurahan melalui intervensi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni guna Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 348 Unit dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sebanyak 38 Unit.



Grafik 3.1 Pengurangan Kumuh Kota Dumai



Gambar 3.1 Bantuan Rumah Layak Huni TA 2022 (P. Sesai dan Lubuk Gaung)



Bila dibandingkan dengan tahun 2021, IKU *Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh* pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai tidak tersedia atau mengalami perubahan mengacu pada RPJMD Kota Dumai tahun 2022-2026 dan perubahan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai sehingga tidak dapat di perbandingkan antar capaian IKU 2021 dengan 2022. Namun sebagai evaluasi kita terhadap kinerja fisik dengan tema capaian yang sama yaitu penanganan kawasan kumuh dengan pembangunan rumah layak huni dan Tangki septik individual dapat kami tampilkan capaian IKU 2021 sebagai berikut:

a. Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat

Pada tahun 2021 Dinas Perkim membangun Tangki Septik Individu sebanyak 250 unit di 5 Kelurahan (Kel. Bukit Timah 52, Kel. Bagan Keladi 70 Unit, Kel. Bumi Ayu 56 Unit, Kel. Guntung 20 Unit, Kel. Mekar Sari 52 Unit) dengan realisasi IKU 12,5 % (diasumsikan 1 IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++ sama dengan 50 unit tangki septik individual) dengan capaian >100%.

b. Persentase pembangunan rumah tidak layak huni

Pada tahun 2021 Dinas Perkim Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh sebanyak 120 Unit yang berada di 7 Kelurahan (Kel. Lubuk Gaung 21 Unit, Kel. Bukit Datuk 20 Unit, Kel. Laksamana 10 Unit, Kel. Mekar Sari 17 Unit, Kel. Pangkalan Sesai 18 Unit, Kel. Purnama 13 Unit, Kel. STDI 21 Unit) dengan Realisasi IKU 11,23%, dengan capaian >100%.

II. Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022, tidak terjadi bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota di Kota Dumai. Namun, sebagai langkah awal pemenuhan SPM Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai telah dilakukan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota terdiri dari 3 Kecamatan dan 9 Kelurahan sepanjang 10 Km dengan rentang lebar 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai dihitung dari bibir pantai yang terletak di Kelurahan Laksamana sampai dengan Sungai Dumai yang berada di Kelurahan Bumi Ayu.

Bila dibandingkan dengan tahun 2021, untuk IKU Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota pada Dinas



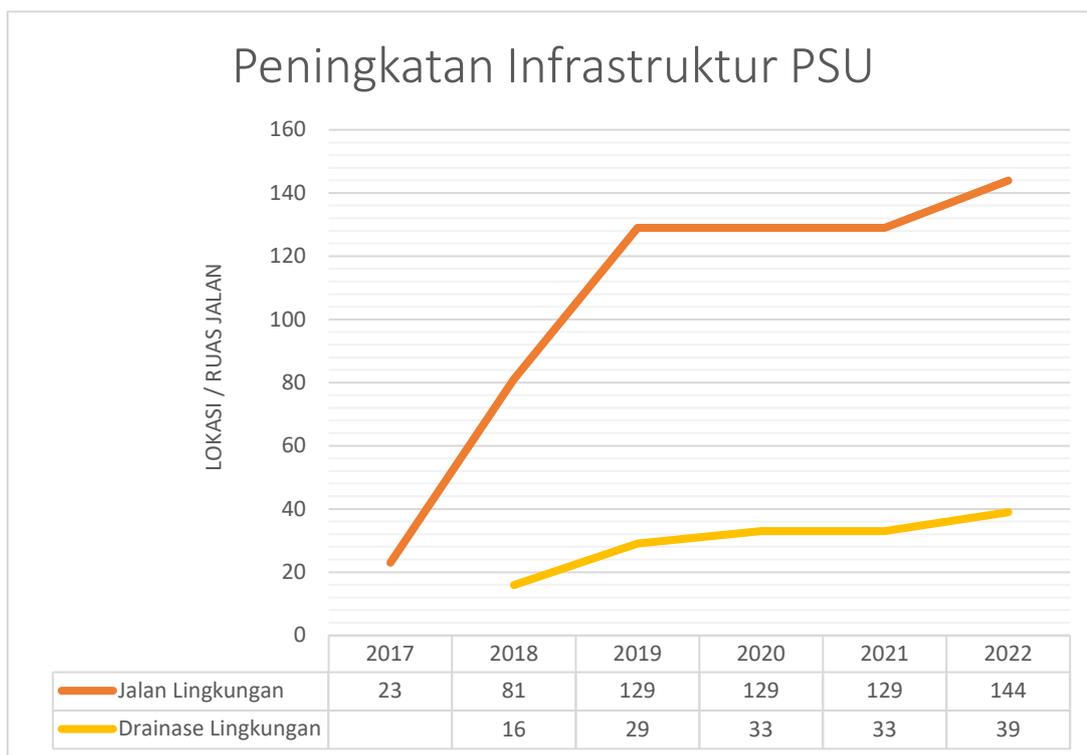
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai tidak tersedia atau mengalami perubahan mengacu pada RPJMD Kota Dumai tahun 2022-2026 dan perubahan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai sehingga tidak dapat di perbandingkan antar capaian IKU 2021 dengan 2022.

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman

III. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Pada tahun 2022, terdapat pembangunan infrastruktur PSU (jalan dan drainase) di kawasan perumahan (non developer) sebanyak 21 lokasi dengan asumsi setiap lokasi dihitung per RT pada kawasan perumahan yang dibangun dengan realisasi terhadap target IKU sebesar 80% dari 35,2% melebihi target % capaian sebesar 227%.

Grafik 3.2 Peningkatan Infrastruktur PSU





Gambar 3.2 Pekerjaan Infrastruktur PSU TA 2022 (Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan)

Bila dibandingkan dengan tahun 2021, IKU Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai tidak tersedia atau mengalami perubahan mengacu pada RPJMD Kota Dumai tahun 2022-2026 dan perubahan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai sehingga tidak dapat di perbandingkan antar capaian IKU 2021 dengan 2022. Namun sebagai evaluasi kita terhadap kinerja fisik dengan tema capaian yang sama yaitu pembangunan infrastruktur dapat kami tampilkan capaian IKU 2021 sebagai berikut:

a. Fasilitas lahan untuk Pemakaman Umum

Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Marga Sarana dengan program dan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman dengan luas 5,5 ha dengan persentase target IKU sebesar 100% . (Pada tahun 2018, pada obyek Taman Makam Pahlawan telah di serahkan dalam hal pengelolaannya pada OPD Dinas Sosial) dan;

b. Panjang Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan

Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang bertujuan untuk membangun jalan lingkungan dan drainase (semenisasi dan infrastruktur lainnya). Kegiatan FISIK Belum dapat berjalan dikarenakan anggaran tidak tersedia pada APBD Kota Dumai Tahun 2021.

**Sasaran Strategis 3: Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik****IV. Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat**

Pada tahun 2022, terdapat 5 kasus konflik pertanahan di Kota Dumai yang dilaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai. Telah dilakukan tindak lanjut dan mediasi terhadap seluruh kasus konflik pertanahan tersebut. Urusan Pertanahan Baru menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2022 sesuai dengan amanat Permendagri 90 tahun 2019 dan tertuang dalam RPJMD 2022-2026 Kota Dumai sehingga capaian IKU 2021 tidak dapat di perbandingkan.

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai khususnya pada tahun 2022, maka telah diimplementasikan strategi dan arah kebijakan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang dijabarkan dalam 6 program, sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Perumahan

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Pengembangan Perumahan yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Pengembangan Perumahan memuaskan.

II. Program Kawasan Permukiman

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Kawasan Permukiman yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani adalah sebesar 24,85 Ha. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebesar 99,42 Ha, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Pengembangan Perumahan memuaskan.



III. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebesar 8%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh memuaskan.

IV. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi adalah sebanyak 25 Lokasi. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebanyak 25 Lokasi, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) memuaskan.

V. Program Penatagunaan Tanah

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Penatagunaan Tanah yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator Persentase Penatagunaan Tanah adalah sebesar 20%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebesar 20%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Penatagunaan Tanah memuaskan.

VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2022, pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memuaskan.

Kendala

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban untuk



mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan keterbatasan alokasi APBD untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai tahun 2022, keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya. Namun demikian, masalah-masalah yang dihadapi terasa semakin kompleks, sehingga ke depannya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas yang lebih berat dalam melaksanakan upaya-upaya agar tetap mencapai target kinerja.

Adapun kendala-kendala yang masih dijumpai dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai antara lain adalah :

1. Meskipun penanganan kawasan kumuh merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan setiap tahun, namun perlu adanya antisipasi munculnya kawasan kumuh baru. Dengan luasnya penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Dumai, belum diimbangi dengan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh yang terencana dan teratur.
2. Di Kota Dumai masih terdapat rumah tidak layak huni. Berdasarkan data RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 17,69% dari jumlah RT dan tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin atau baru mencapai lebih kurang 26%. Hal ini disebabkan juga oleh terbatasnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
3. Penyediaan infrastruktur sangat terbatas. Dengan keterbatasan alokasi APBD, kapasitas pembangunan sarana PSU menurun dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Sementara itu, masih terdapat permukiman yang memerlukan infrastruktur dasar yang layak.
4. Permasalahan administrasi pertanahan yang belum terlaksana dengan baik dan benar sehingga berdampak pada munculnya konflik-konflik terkait pertanahan, baik dengan masyarakat maupun dengan Pemerintah Kota Dumai.
5. Adanya perbedaan regulasi terkait penanganan rumah korban bencana antara BNPB dan SPM PUPR yaitu bencana kebakaran, banjir, bukan merupakan bencana alam sehingga tidak/belum dapat di intervensi.
6. Rendahnya Capacity Building bagi penyelenggaraan swakelola, tim pelaksana dan tim pengawas atau organisasi masyarakat serta penerima manfaat dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.



Solusi

1. Selain melaksanakan penanganan kawasan kumuh, dilakukan juga pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh yang terencana dan teratur. Dimulai dari pembuatan dokumen pendukung penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, yaitu (1) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; (2) Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh; dan (3) dokumen pendukung lainnya.
2. Karena adanya keterbatasan kewenangan, maka penyelesaian permasalahan rumah tidak layak huni perlu melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kota Dumai harus sering melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait dana alokasi khusus (DAK) Perumahan dan bantuan keuangan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
3. Permasalahan penyediaan infrastruktur sangat terbatas memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi harus sering dilakukan. Selain itu, koordinasi dan konsultasi dengan anggota dewan juga merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur di Kota Dumai.
4. Permasalahan administrasi pertanahan dapat diselesaikan dengan mengadakan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik, baik masyarakat maupun Pemerintah Kota Dumai.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut.
6. Menyiapkan data dan informasi program terkait yang akurat dan lengkap, serta memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada secara maksimal.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, alokasi Perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai sebesar Rp 30.420.926.685 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 29.364.083.743 atau 96,53%. Anggaran Perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dialokasikan ke dalam 6 program (terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintahan, 4 program urusan pemerintahan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan 1 program urusan pemerintahan wajib bidang pertanahan), dan



15 kegiatan (terdiri dari 7 kegiatan penunjang urusan pemerintahan, 7 kegiatan urusan pemerintahan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan 1 kegiatan urusan pemerintahan wajib bidang pertanahan),

Realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai dapat kami jabarkan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dianggarkan sebesar Rp 5.142.223.289 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.783.371.502 atau 93,02%. Adapun kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut:

- i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 5.920.703 dan telah dipergunakan sebesar Rp 5.793.250 atau realisasi sebesar 97,85%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 1.749.818 dan telah digunakan sebesar Rp 1.738.750 atau terealisasi 99,37% dengan indikator Jumlah Penyusunan rencana kinerja SKPD 12 Bulan
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dianggarkan dana sebesar Rp 4.170.885 dan telah digunakan sebesar Rp 4.054.500 atau terealisasi 97,21% dengan indikator Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Bulan
 - 3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 3.675.908.621 dan telah dipergunakan sebesar Rp 3.384.738.879 atau realisasi sebesar 92,08%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan dana sebesar Rp 3.673.860.071 dan telah digunakan sebesar Rp 3.382.753.879 atau terealisasi 92,08% dengan indikator Jumlah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 100%
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dianggarkan dana sebesar Rp 2.048.550 dan telah digunakan sebesar Rp 1.985.000 atau terealisasi 96,90% dengan indikator Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12 Bulan



- ii. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 1.536.464 dan telah dipergunakan sebesar Rp 1.469.000 atau realisasi sebesar 95,61%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
 - 6) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dianggarkan dana sebesar Rp 1.536.464 dan telah dipergunakan sebesar Rp 1.469.000 atau realisasi sebesar 95,61% dengan indikator Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset 100%
- iii. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 434.750.783 dan telah dipergunakan sebesar Rp 430.365.059 atau realisasi sebesar 98,99%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
 - 7) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan dana sebesar Rp 60.158.900 dan telah digunakan sebesar Rp 59.351.200 atau terealisasi 98,66% dengan indikator Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor 100% dan Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) 100%
 - 8) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan dana sebesar Rp 16.726.973 dan telah digunakan sebesar Rp 15.901.000 atau terealisasi 95,06% dengan indikator Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan 90%
 - 9) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dianggarkan dana sebesar Rp 5.435.850 dan telah digunakan sebesar Rp 5.058.000 atau terealisasi 93,05% dengan indikator Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor 12 Bulan
 - 10) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan dana sebesar Rp 4.522.350,- dan telah digunakan sebesar Rp 4.380.000 atau terealisasi 96,85% dengan indikator Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan
 - 11) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dianggarkan dana sebesar Rp 15.482.100 dan telah digunakan sebesar Rp 13.368.000 atau terealisasi 86,34% dengan indikator Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan 12 Bulan
 - 12) Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 434.750.783 dan telah digunakan sebesar Rp 430.365.059 atau terealisasi 98,99% dengan indikator Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 %



- iv. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 223.018.000 dan telah dipergunakan sebesar Rp 202.183.000 atau realisasi sebesar 90,66%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
- 13) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan dana sebesar Rp 70.283.625 dan telah digunakan sebesar Rp 70.259.000 atau terealisasi 99,96% dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit
 - 14) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dianggarkan dana sebesar Rp 39.694.375 dan telah digunakan sebesar Rp 39.684.000 atau terealisasi 99,97% dengan indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit
 - 15) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan dana sebesar Rp 113.040.000 dan telah digunakan sebesar Rp 92.240.000 atau terealisasi 81,60% dengan indikator Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10 Unit
- v. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 196.620.000 dan telah dipergunakan sebesar Rp 196.323.440 atau realisasi sebesar 99,85%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
- 16) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dianggarkan dana sebesar Rp 141.860.000,- dan telah digunakan sebesar Rp 141.832.440 atau terealisasi 99,98% dengan indikator Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan
 - 17) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan dana sebesar Rp 44.570.000 dan telah digunakan sebesar Rp 44.431.000 atau terealisasi 99,69% dengan indikator Jumlah penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 Bulan
 - 18) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan dana sebesar Rp 10.190.000 dan telah digunakan sebesar Rp 10.060.000 atau



teralisasi 98,72% dengan indikator Jumlah penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Bulan

- vi. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 604.468.718 dan telah dipergunakan sebesar Rp 562.498.874 atau realisasi sebesar 93,06%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
 - 19) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dianggarkan dana sebesar Rp 2.585.000 dan telah digunakan sebesar Rp 2.398.500 atau terealisasi 92,79% dengan indikator persentase rata-rata surat yang disampaikan 85 %
 - 20) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dana sebesar Rp 30.370.000 dan telah digunakan sebesar Rp 9.360.000 atau terealisasi 30,82% dengan indikator Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan
 - 21) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan dana sebesar Rp 571.513.718 dan telah digunakan sebesar Rp 550.740.374 atau terealisasi 96,37% dengan indikator Jumlah Penyediaan jasa tenaga pelayanan kantor 12 Bulan

II. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan dianggarkan sebesar Rp 450.000.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 98.570.994 atau 21,90%. Adapun kegiatan pada program Pengembangan Perumahan sebagai berikut.

- vii. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dianggarkan dana sebesar Rp 100.000.000 dan telah dipergunakan sebesar Rp 98.570.994 atau realisasi sebesar 98,57%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
 - 22) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dianggarkan dana sebesar Rp 100.000.000 dan telah dipergunakan sebesar Rp 98.570.994 atau realisasi sebesar 98,57% dengan indikator Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen
- viii. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dianggarkan dana sebesar Rp 350.000.000 dan telah



dipergunakan sebesar Rp 0 atau realisasi sebesar 0%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.

- 23) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dianggarkan dana sebesar Rp 350.000.000 dan telah dipergunakan sebesar Rp 0 atau realisasi sebesar 0% dengan indikator Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 0 Unit Rumah

III. Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp 17.895.615.300 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 17.874.662.679 atau 99,88%. Adapun kegiatan pada program kawasan permukiman, yaitu sebagai berikut.

- ix. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dianggarkan dana sebesar Rp 250.000.000 dan telah dipergunakan sebesar Rp 249.372.685 atau realisasi sebesar 99,75%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
 - 24) Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh dianggarkan dana sebesar Rp 250.000.000 dan telah digunakan sebesar Rp 249.372.685 atau terealisasi 99,75% dengan indikator Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi 1 Dokumen
- x. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dianggarkan sebesar Rp 111.850.200 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 101.370.000 atau 90,63%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
 - 25) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dianggarkan dana sebesar Rp 100.065.100 dan telah digunakan sebesar Rp 92.370.000 atau terealisasi 92,31% dengan indikator Jumlah penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 12 Bulan
 - 26) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dianggarkan dana sebesar Rp 11.785.100 dan telah digunakan sebesar Rp 9.000.000 atau terealisasi 76,37%



dengan indikator Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 12 Bulan

- xi. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dianggarkan sebesar Rp 17.533.765.100 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 17.523.919.994 atau 99,94%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
 - 27) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dianggarkan dana sebesar Rp 100.000.000 dan telah digunakan sebesar Rp 98.775.830 atau terealisasi 98,78% dengan indikator Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 1 Dokumen
 - 28) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dianggarkan dana sebesar Rp 216.798.000 dan telah digunakan sebesar Rp 215.113.014 atau terealisasi 99,22% dengan indikator Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 12 Bulan
 - 29) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh dianggarkan dana sebesar Rp 65.100 dan telah digunakan sebesar Rp 0 atau terealisasi 0% dengan indikator Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang terverifikasi dan terdata 1 Dokumen
 - 30) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dianggarkan dana sebesar Rp 17.216.902.000 dan telah digunakan sebesar Rp 17.210.031.150 atau terealisasi 99,96% dengan indikator Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 100%

IV. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dianggarkan sebesar Rp 2.500.630.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.500.555.677 atau 100%. Adapun kegiatan pada program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, yaitu sebagai berikut.

- xii. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan dana sebesar Rp 2.500.630.000 dan realisasi



penyerapan anggaran sebesar Rp 2.500.555.677 atau 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.

- 31) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dianggarkan dana sebesar Rp 2.500.630.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.500.555.677 atau 100% dengan indikator Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 100%

V. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dianggarkan sebesar Rp 4.332.458.096 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.007.538.891 atau 92,50%. Adapun kegiatan pada program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), yaitu sebagai berikut.

- xiii. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dianggarkan dana sebesar Rp 4.332.458.096 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.007.538.891 atau 92,50%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
 - 32) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dianggarkan dana sebesar Rp 264.000.000 dan telah digunakan sebesar Rp 243.652.593 atau terealisasi 92,29% dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen
 - 33) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dianggarkan dana sebesar Rp 4.044.798.096 dan telah digunakan sebesar Rp 3.740.231.298 atau terealisasi 92,47% dengan indikator Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1 Lokasi, Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 12 Bulan, dan Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 12 Bulan
 - 34) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dianggarkan dana sebesar Rp 23.660.000 dan telah digunakan sebesar Rp 23.655.000 atau terealisasi 99,98% dengan indikator Jumlah penyediaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 12 Bulan



VI. Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah dianggarkan sebesar Rp 100.000.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99.384.000 atau 99,38%. Adapun kegiatan pada program Penatagunaan Tanah, yaitu sebagai berikut.

- xiv. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan dana sebesar Rp 100.000.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99.384.000 atau 99,38%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut.
- 35) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota dana sebesar Rp 100.000.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99.384.000 atau 99,38%. dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen

Tabel 3.4 Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.142.223.289	4.783.371.502	93%
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.920.703	5.793.250	98%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.749.818	1.738.750	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.170.885	4.054.500	97%
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.675.908.621	3.384.738.879	92%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.673.860.071	3.382.753.879	92%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.048.550	1.985.000	97%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.536.464	1.469.000	96%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.536.464	1.469.000	96%
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.750.783	430.365.059	99%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.435.850	5.058.000	93%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.158.900	59.351.200	99%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.482.100	13.368.000	86%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.726.973	15.901.000	95%



NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.522.350	4.380.000	97%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.424.610	332.306.859	100%
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	223.018.000	202.183.000	91%
	Pengadaan Mebel	39.694.375	39.684.000	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.283.625	70.259.000	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.040.000	92.240.000	82%
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.468.718	562.498.874	93%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.585.000	2.398.500	93%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.370.000	9.360.000	31%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.513.718	550.740.374	96%
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.620.000	196.323.440	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.860.000	141.832.440	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.570.000	44.431.000	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.190.000	10.060.000	99%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	450.000.000	98.570.994	22%
a	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	98.570.994	99%
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	98.570.994	99%
b	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	350.000.000	-	0%
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	350.000.000	-	0%
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.895.615.300	17.874.662.679	100%
a	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	250.000.000	249.372.685	100%
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	250.000.000	249.372.685	100%
b	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	111.850.200	101.370.000	91%
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	100.065.100	92.370.000	92%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	11.785.100	9.000.000	76%
c	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	17.533.765.100	17.523.919.994	100%



NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	100.000.000	98.775.830	99%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	216.798.000	215.113.014	99%
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	65.100	-	0%
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	17.216.902.000	17.210.031.150	100%
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.500.630.000	2.500.555.677	100%
a	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.500.630.000	2.500.555.677	100%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.500.630.000	2.500.555.677	100%
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.332.458.096	4.007.538.891	93%
a	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.332.458.096	4.007.538.891	93%
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	264.000.000	243.652.593	92%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.044.798.096	3.740.231.298	92%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	23.660.000	23.655.000	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
6	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100.000.000	99.384.000	99%
a	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.384.000	99%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.384.000	99%
	JUMLAH	30.420.926.685	29.364.083.743	96,53%

Dari total Rp 30.420.926.685 anggaran untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai telah terealisasi sebesar Rp 29.364.083.743 atau dengan persentase capaian sebesar 96,53%. Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp 5.142.223.289 (17%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 4.783.371.502 atau 93%, anggaran urusan pemerintahan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebesar Rp 25.178.703.396 (83%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 24.481.328.241 atau 97%, dan urusan pemerintahan wajib bidang pertanahan sebesar Rp 100.000.000 (0,3%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 99.384.000 atau 99%.



Dari 6 program, hanya Program Pengembangan Perumahan yang persentase penyerapannya di bawah 90% yakni sebesar 22%. Sementara untuk persentase pencapaian 5 program lainnya penyerapannya di atas 90%. Belum optimalnya penyerapan anggaran Program Pengembangan Perumahan karena ada sub kegiatan yang tidak terealisasi yaitu sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana direncanakan untuk korban kebakaran rumah di Kota Dumai, tetapi sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa kebakaran rumah bukan merupakan bencana. Sementara pada Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 ditetapkan nomenklatur sub kegiatan yaitu Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Oleh karena itu, sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan sumber anggaran, APBD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022 bersumber dari berbagai sumber dana antara lain, yaitu APBD Kota Dumai, APBD Provinsi Riau (Bantuan Keuangan), dan APBN (DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman), dengan alokasi pagu dan realisasi seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Sumber Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022

No.	Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	APBD Kota Dumai	20.624.796.685	19.573.705.113	94,90%
2.	APBD Provinsi Riau (Bantuan Keuangan)	2.470.000.000	2.464.248.630	98,47%
3.	APBN (DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman)	7.326.130.000	7.326.130.000	100%
	TOTAL	30.420.926.685	29.364.083.743	96,53%

Dari tabel di atas menunjukkan penyerapan anggaran berdasarkan sumber anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai. Anggaran yang bersumber dari APBD Kota Dumai terserap sebesar 94,90%. Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riau yaitu Bantuan Keuangan terserap sebesar 98,47%. Dan anggaran yang bersumber dari APBN yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman terserap sebesar 100%.

Tabel 3.6 Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5.	BELANJA DAERAH	30.420.926.685,00	29.364.083.743,00	96,53	9.521.974.443,00
5.1.	BELANJA OPERASI	26.774.046.235,00	25.984.211.443,00	97,05	8.874.784.143,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.851.860.071,00	3.524.583.879,00	91,50	2.913.595.784,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.178.186.164,00	12.715.627.564,00	96,49	5.961.188.359,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	9.744.000.000,00	9.744.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	3.646.880.450,00	3.379.872.300,00	92,68	647.190.300,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.477.450,00	112.872.300,00	97,74	251.194.300,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	210.142.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.531.403.000,00	3.267.000.000,00	92,51	185.854.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(30.420.926.685,00)	(29.364.083.743,00)	96,53	(9.521.974.443,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(30.420.926.685,00)	(29.364.083.743,00)	96,53	(9.521.974.443,00)

Dari tabel di atas menunjukkan penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai. Belanja Operasi terealisasi 97,05 % dengan rincian yaitu; belanja Pegawai yang merupakan pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai terealisasi 91,5 %; belanja barang jasa yang merupakan pemenuhan kegiatan rutin kantor seperti, belanja ATK, Peralatan, BBM, Air dan Listrik, Makan Minum, Kajian, Konsultasi dan juga kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana (tidak dapat terlaksana) terealisasi 96,49 %, dan; belanja bantuan sosial yang merupakan bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni terealisasi 100%. Belanja Modal terealisasi 92,68 % dengan rincian yaitu; Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi 97,74 % yang merupakan pemenuhan kegiatan belanja alat mesin kantor seperti AC, Komputer, dsb.; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi 92,51 yang merupakan kegiatan fisik pembangunan Infrastruktur PSU di kawasan Permukiman.



Tabel 3.6 Efisiensi Kinerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program Wajib	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
									Rp	% Capaian	
Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu											
Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas											
	Tujuan	Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	52,46						
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	%	60,77						
		Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Aturan	%	59,99						
Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	22,7	88	>100	Program Kawasan Permukiman	17.895.615.300	17.874.662.679	99,88	
		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100	100	100	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.500.630.000	2.500.555.677	99,99	
			Program Pengembangan Perumahan	450.000.000	98.570.994	21,90					



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program Wajib	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
									Rp	% Capaian	
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	35	80	>100	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4.332.458.096	4.007.538.891	92,50	
	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	20	20	100	Program Penatagunaan Tanah	100.000.000	99.384.000	99,38	
Capaian Rat-rata						100		25.278.703.396	24.580.712.241	97,24	2,76



BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Perencanaan Strategis, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan program-program yang merupakan penjabaran dari Visi Misi pembangunan Kota Dumai.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), seluruhnya telah mencapai kinerja yang memuaskan, tercapai 100% bahkan lebih. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Dengan demikian, secara umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

أَمِين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Dumai, Januari 2023

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI**

KEPALA,



FAUZI EFRIZAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720702 199201 1 001



LAMPIRAN

- A. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022
- B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
- C. RENCANA AKSI DARI PERJANJIAN
KINERJA 2022
- D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN/
EVALUASI IKU



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA DUMAI
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **FAUZI EFRIZAL, S.Sos, M.Si**
J a b a t a n : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Selanjutnya di sebut ***Pihak Pertama***

N a m a : **PAISAL, SKM, MARS**
J a b a t a n : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2022 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA

FAUZI EFRIZAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19720702 199201 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	22,7
		2. Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100
2.	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	1. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	35
3.	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	1. Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	20

Sasaran 1 :	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 450.000.000
		2. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp. 2.500.630.000
		3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 17.895.615.300
Sasaran 2 :	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	1. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp. 4.332.458.096
Sasaran 3 :	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	1. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp. 100.000.000
		Jumlah	Rp. 25.278.703.396

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	TARGET TAHUNAN 2022
1	2	3		4	5
	Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas				
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	22,7
		2	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100
2	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	35
3	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	1	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	20

Dumai, 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KOTA DUMAI
K E P A L A,


FAUZI FRIZA, S.Sos, M.Si
NIP. 19720702 199201 1 001

**PERUBAHAN RENCANA AKSI
TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	22,7					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	Rp 450.000.000
		2 Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	9%	Rp 2.500.630.000
									PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	28,92%	Rp 17.895.615.300
2	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	1 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	35					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	35%	Rp 4.332.458.096
3	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	1 Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	20					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	20%	Rp 100.000.000
											Jumlah	Rp 25.278.703.396



**EVALUASI BERKALA RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022 BERKALA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Target/Realisasi												Realisasi Tahunan 2022	Persen	Ket
					Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4					
					Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen			
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	22,7	0	0	100	0	5	100	11,35	20	100	22,7	88	>100	88	>100	
		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	35	0	0	100	0	0	100	17,5	40	100	35	80	>100	80	>100	
3	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	20	5	0	0	10	0	0	15	0	0	20	100	100	100	100	Merupakan Tupoksi Baru, dianggarkan pada APBD Perubahan 2022 Bulan Oktober

Dumai, 2022
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 KOTA DUMAI
 K E P A L A,**



FAUZI EFFRIZAL, S.Sgs, M.Si
 NIP. 19720702 199201 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI
TAHUN 2022-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	0%	22,70%	39,96%	57,22%	79,64%	94,28%	94,28%
2.	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	11%	35%	48%	62%	86%	100%	100%
4.	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%

Dumai, 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI
KEPALA,



FAUZI FRIZAL, S.Sos, M.Si
 NIP. 19720702 199201 1 001